



**PERATURAN
BUPATI BENGKAYANG**

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

TAHUN ANGGARAN 2011



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2010, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 12. Undang – undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 18. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 15.459.810.618,11	
b. Dana Perimbangan	Rp. 499.587.560.786,15	
c. Lain – lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 16.212.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 531.259.371.404,26
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
(1) Belanja Pegawai	Rp.224.588.925.002,45	
(2) Belanja Bunga	Rp. –	
(3) Belanja Subsidi	Rp. –	
(4) Belanja Hibah	Rp. 14.250.878.000,-	
(5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.897.227.440,-	
(6) Belanja Bagi Hasil	Rp. –	
(7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 14.603.430.22875	
(8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 898.666.002,09</u>	
		Rp.259.239.126.673,29
b. Belanja Langsung		
(1) Belanja Pegawai	Rp.18.282.810.260	
(2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 129.557.853.602,-	
(3) Belanja Modal	Rp. 119.101.966.877,-	
		Rp.266.942.630.739,-
Jumlah Belanja		Rp 526.181.757.412,29
Surplus/(Defisit)		Rp. 5.077.613.991,97

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		Rp. 38.935.504.993,08,-
b. Pengeluaran		Rp. 500.000.000,-
	jumlah Pembiayaan Neto	Rp.38.435.504.993,08
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp. 43.513.118.985,05

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantu dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan PAsal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:

Pasal 6

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 24 September 2012

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal ~~25~~ September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

Drs.KRISTIANUS ANYIM, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2012 NOMOR 1A.....

RINGKASAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	546.838.883.530,15	531.259.371.404,26	(15.579.512.125,89)	97,15
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	19.383.549.571,03	15.459.810.618,11	(3.923.738.952,92)	79,76
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.000.000.000,00	1.848.663.690,83	(1.151.336.309,17)	61,62
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.000.000.000,00	5.575.794.650,38	(424.205.349,62)	92,93
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.120.241.565,43	2.120.241.565,43	0,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.263.308.005,60	5.915.110.711,47	(2.348.197.294,13)	71,58
1.2	DANA PERIMBANGAN	436.486.459.591,00	429.273.733.397,90	(7.212.726.193,10)	98,35
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.808.336.591,00	29.595.610.397,90	(7.212.726.193,10)	80,40
1.2.2	Dana Alokasi Umum	340.561.423.000,00	340.561.423.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	59.116.700.000,00	59.116.700.000,00	0,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	90.968.874.368,12	86.525.827.388,25	(4.443.046.979,87)	95,12
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.735.107.928,12	11.243.229.948,25	(4.491.877.979,87)	71,45
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59.021.766.440,00	59.070.597.440,00	48.831.000,00	100,08
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.212.000.000,00	16.212.000.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA	580.794.642.651,15	526.181.757.412,29	(54.612.885.238,86)	90,60
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	267.104.183.143,72	259.239.126.673,29	(7.865.056.470,43)	97,06
2.1.1	Belanja Pegawai	228.923.937.572,72	224.588.925.002,45	(4.335.012.570,27)	98,11
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.901.809.621,00	14.250.878.000,00	(2.650.931.621,00)	84,32
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.775.000.000,00	4.897.227.440,00	(877.772.560,00)	84,80
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	14.603.435.950,00	14.603.430.228,75	(5.721,25)	100,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	900.000.000,00	898.666.002,09	(1.333.997,91)	99,85
2.2	BELANJA LANGSUNG	313.690.459.507,43	266.942.630.739,00	(46.747.828.768,43)	85,10
2.2.1	Belanja Pegawai	19.827.539.580,00	18.282.810.260,00	(1.544.729.320,00)	92,21
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	138.404.835.480,43	129.557.853.602,00	(8.846.981.878,43)	93,61
2.2.3	Belanja Modal	155.458.084.447,00	119.101.966.877,00	(36.356.117.570,00)	76,61

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(33.955.759.121,00)	5.077.613.991,97	39.033.373.112,97	(14,95)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.935.504.993,00	38.935.504.993,08	0,08	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38.935.504.993,00	38.935.504.993,08	0,08	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.979.745.872,00	500.000.000,00	(4.479.745.872,00)	10,04
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	4.479.745.872,00	0,00	(4.479.745.872,00)	0,00
3.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(43.513.118.985,05)	(43.513.118.985,05)	0,00
3.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(43.513.118.985,05)	(43.513.118.985,05)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	33.955.759.121,00	38.435.504.993,08	4.479.745.872,08	113,19
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	43.513.118.985,05	43.513.118.985,05	0,00

Bengkayang,
BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

BELANJA